

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) saat ini belum menggunakan secara penuh (*full adoption*) standar akuntansi internasional atau *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Standar akuntansi di Indonesia yang berlaku saat ini mengacu pada US GAAP (*United States Generally Accepted Accounting Standards*), namun pada beberapa pasal sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya belum menyeluruh, baru sebagian (harmonisasi). Sebenarnya PSAK sejak 1994 disusun dengan menggunakan referensi utama *International Accounting Standards*. Namun dalam PSAK tidak menyebutkan secara eksplisit jika standar tersebut mengadopsi IAS. Dalam perkembangannya setelah 1994, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru.

Pengadopsian IFRS ke dalam standar akuntansi di Indonesia bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, persyaratan akan item-item pengungkapan akan semakin tinggi sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula, manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan, laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan laporan keuangan akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan dan beban perusahaan.

Dampak penerapan IFRS bagi perusahaan sangat beragam tergantung jenis industri, jenis transaksi, elemen laporan keuangan yang dimiliki dan juga pilihan kebijakan akuntansi. Ada yang perubahannya besar sampai harus melakukan perubahan sistem operasi dan bisnis

perusahaan, namun ada juga perubahan tersebut hanya terkait dengan prosedur akuntansi.

SAK yang berbasis IFRS (SAK Umum) ditujukan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. SAK umum tersebut rumit untuk dipahami serta diterapkan bagi sebagian besar entitas usaha di Indonesia yang berskala kecil dan menengah. Oleh sebab itu DSAK menggunakan kertas kerja IFRS menuju *SME Accounting Standards* sebagai basis penyusunan konsep sementara PSAK bagi UKM.

Pada tanggal 19 Mei 2009, Ikatan Akuntansi Indonesia telah meluncurkan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan dini per 1 Januari 2010 diperbolehkan. Sasaran dari SAK ETAP ini yaitu entitas bisnis yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik (perusahaan tertutup) dan entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pihak eksternal. Entitas memiliki akuntabilitas publik apabila suatu entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau *regulator* lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK Umum

dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Apabila perusahaan memakai SAK ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK ETAP.

Mulai tahun 2011, setiap entitas tanpa akuntabilitas publik diberikan pilihan apakah akan menggunakan PSAK umum atau SAK ETAP. Apabila pada tahun 2011 suatu entitas tanpa akuntabilitas publik telah menetapkan untuk menggunakan PSAK umum, maka entitas tersebut setelah tahun 2011 tidak boleh merevisi kebijakan akuntansinya dengan menggunakan SAK ETAP. Sebaliknya, apabila suatu entitas tanpa akuntabilitas publik telah memilih untuk menerapkan SAK ETAP perlu melihat dampak penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangannya.

Penelitian ini dilakukan pada PT Andalan Chrisdeco sebagai perusahaan tanpa akuntabilitas publik yang bergerak di bidang perdagangan mobil, perbengkelan dan showroom, serta menjalankan usaha-usaha penyediaan dan penjualan aksesoris dan suku cadang. Pada tahun 2011, perusahaan memutuskan untuk menerapkan SAK ETAP, diharapkan perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang diharuskan, yaitu SAK ETAP untuk pihak eksternal dan internal perusahaan.

Dengan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada PT Andalan Chrisdeco.”**

1.1.2. Perumusan Masalah Pokok

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih fokus, untuk mengarahkan dan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan pengolahan data maka masalah-masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah SAK ETAP telah diimplementasikan sebagai standar penyusunan neraca PT Andalan Chrisdeco?

2. Apakah SAK ETAP telah sepenuhnya diterapkan dalam pelaporan pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas pada PT Andalan Chrisdeco?

1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian dan menghindari pembahasan yang meluas maka penulis hanya mengevaluasi pos-pos yang terdapat pada neraca PT Andalan Chrisdeco ditinjau berdasarkan SAK ETAP pada tahun buku 2012.

1.2. Kerangka Teori

SAK ETAP telah dirancang sebagai standar dalam penyajian laporan keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Maka dalam skripsi ini penulis akan mengevaluasi penerapan perlakuan akuntansi terhadap pos-pos yang terdapat dalam neraca PT Andalan Chrisdeco, seperti pelaporan aset, kewajiban, dan ekuitas yang berdasarkan SAK ETAP.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengevaluasi pengimplementasian SAK ETAP sebagai standar penyusunan neraca PT Andalan Chrisdeco.
2. Untuk menilai sejauh mana SAK ETAP telah diterapkan dalam pelaporan pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca PT Andalan Chrisdeco.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian terapan (*applied research*) karena melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi PT Andalan Chrisdeco, berupa informasi mengenai perlakuan akuntansi yang tepat untuk penyusunan laporan keuangan

sesuai dengan SAK ETAP. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain:

1.3.1.1. Bagi Penulis

Memberikan pemahaman yang lebih baik bagi penulis mengenai perlakuan akuntansi yang sesuai dengan SAK ETAP.

1.3.1.2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun laporan neraca yang sesuai dengan SAK ETAP.

1.3.1.3. Bagi STEI

Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan didalam menyusun penelitian karya tulis selanjutnya.

1.3.1.4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang telah mendalam tentang SAK ETAP dan pengimplementasiannya secara nyata.